



PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIPHK

***(Ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Progam Jaminan Kehilangan Pekerjaan)***

ALISYA IVANNA INSYIRA

1810611052

SKRIPSI

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIPHK

***(Ditinjau dari Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Progam Jaminan Kehilangan Pekerjaan)***

ALISYA IVANNA INSYIRA

1810611052

Skripsi ini telah disetujui untuk diseminarkan pada seminar desiminasi
Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 November 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Siti Nurul Intan Sari D, S.H., M.Kn

NIDN. 487101310301



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Alisya Ivanna Insyira

NPM : 1810611052

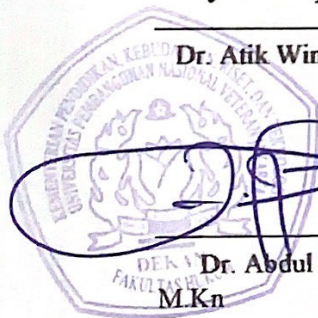
Program Studi : S1 Hukum

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H

Siti Nurul Intan S.H., M.Kn



Dr. Abdul Halim, M.Ag
M.Kn

Taupiqurrahman, S.H.,

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Januari 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Alisya Ivanna Insyira
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 13 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Kemuning I No.7, Pejaten Timur,
Jakarta Selatan.
No. Telpn : 087700121308
Email : alisyaivannai@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Syahrir, S.E., S.IKom, MM.
b. Ibu : Nilla Kurnia, S.H.

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD IKAL MEDAN 2006-2012
2. SMP : SMP PANCA BUDI MEDAN 2012-2015
3. SMA : SMA MUHAMMADIYAH 4 JAKARTA 2015-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Perempuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pimpinan Ranting SMA Muhammadiyah 4 Jakarta 2016-
2017
2. Ketua Jurnalistik dan Sinematografi SMA
Muhammadiyah 4 Jakarta 2017-2018
3. Anggota Lembaga Bantuan Hukum FH UPNVJ 2019-
Sekarang

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam bentuk penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Alisya Ivanna Insyira

N.I.M : 1810611052

Tanggal : 27 November 2021

Tanda Tangan :



Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alisya Ivanna Insyira

NIM/ NPM : 1810611052

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIPHK
(Ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan PP No 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan
Kehilangan Pekerjaan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*)
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengeloahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional berputasi/jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber- ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 27 November 2021

Yang Menyatakan,



Alisya Ivanna Insyira

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIPHK (Ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kehilangan Pekerjaan)** " dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Alm. Syahrir S.E., S.Ikom., MM., yang selalu menjadi inspirasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini dan Ibunda Nilla Kurnia S.H., yang selalu memberikan arahan dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Athaya Maharani selaku adik yang selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini.

Selain itu dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, dorongan, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat bergabung dalam keluarga besar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta/
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat bergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Dr. Heru Sugyono, S.H., M.H selaku Kepala Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

8. Ibu Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, S.H., M.Kn, selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Ibu Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn, sebagai pembahas pada seminar proposal.
10. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
11. Serta teman teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 27 November 2021

Alisya Ivanna Insyira

ABSTRACT

The entry of the coronavirus into Indonesia, the government declared the epidemic a national calamity and implemented a slew of laws that contributed to the country's economic collapse, which hurt businesses that were compelled to lay off staff. This is unquestionably harmful to workers who rely on their paychecks to live their lives. Despite the government's best efforts, it is confident that laid-off workers will be able to meet their demands. Workers should be able to maintain a decent life after not working, according to the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on job creation and the government regulation No. 37 of 2021 on job loss guarantee. (1) How is the fulfillment of laid-off workers in accordance with Law No. 11 of the Republic of Indonesia of 2020 and Government Regulation No. 37 of 2021? (2) What penalties are imposed on employers who fail to meet their obligations? This study is normative. The Statute Approach employs judicial research in conjunction with the problem approach strategy. The government also imposes strict penalties on employers who comply with their obligations in accordance with the regulations.

Keywords: Employee Rights, Lay Off, Penalties Employers

ABSTRAK

Masuknya virus Corona di Indonesia membuat pemerintah menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional dan mengeluarkan beberapa regulasi yang membuat turunnya sektor ekonomi di Indonesia yang kian berimbas pada perusahaan harus mengambil langkah untuk merumahkan dan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerjanya. Hal ini tentu merugikan pekerja yang memiliki gaji untuk pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Pemerintah dengan segala upaya sangat mengantisipasi agar pekerja yang diPHK tetap terpenuhi kebutuhannya. Dengan disahkan Undang-undang Cipta Kerja dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan diharapkan agar pekerja dapat mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja setelah diPHK dengan mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK di masa pandemi Covid-19 menurut Undang-undang Cipta Kerja dan PP No.37 Tahun 2021? dan (2) Sanksi apa yang diberikan bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak pekerja yang di PHK? Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Sanksi yang tegas juga turut diatur oleh pemerintah bagi pemberi kerja yang memPHK karyawannya namun tidak memberikan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

***Kata kunci: Hak Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Sanksi
Perusahaan***

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
BIODATA PENULIS.....	vi
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	7

BAB II

TINJAUAN

A. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>).....	11
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Pekerja, Pemberi Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja.....	13
2. Tinjauan Umum tentang Covid-19.....	31

BAB III

DESKRIPSI HASIL TEMUAN 34

A. Pemenuhan Hak Pekerja yang diPHK saat pandemi Covid-19.	34
B. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja.....	36
C. Kewajiban Perusahaan Saat Pemutusan Hubungan Kerja.....	39
D. Sanksi Bagi Perusahaan.....	40

BAB IV

ANALISA

A. Hak pekerja yang terkena PHK di masa pandemi Covid-19 menurut Undang-undang Cipta Kerja dan PP No.37 Tahun 2021.....	42
1. Hak-hak Pekerja PKWT yang terkena PHK di masa Pandemi Covid-19.....	42
2. Hak-hak Pekerja dengan PKWTT yang terkena PHK di masa Pandemi Covid-19.....	45
3. Pemenuhan hak karyawan yang di PHK selama pandemi Covid-19.....	54
B. Sanksi Bagi Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.....	56

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

